



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 24 TAHUN 2014

T E N T A N G

KUALITAS BAHAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Kualitas Bahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2009 tentang Kualitas Bahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan harga bahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang kualitas bahan dan standar satuan harga pakaian dinas pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran

- Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KUALITAS BAHAN DAN STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 2

Kualitas bahan dan standar Satuan Harga Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian dengan kualitas kain wool dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per pasang;
- b. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang dengan kualitas bahan kain wool dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
- c. Pakaian Sipil Resmi dengan kualitas bahan kain wool dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per pasang;
- d. Pakaian sipil lengkap dengan kualitas bahan kain wool dengan harga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) per pasang.

Pasal 3

Kualitas bahan dan standar satuan harga Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, b dan c diperuntukan bagi Anggota DPRD periode 2009-2014 dan pakaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d diperuntukan bagi Anggota DPRD periode 2014-2019 yang telah diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Proses pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui DPA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2009 tentang Kualitas Bahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 7 - 5 - 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Ass. J	1
2	SEK. DPRD	2
3	KARO HUKUM	
4		
5		

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 7 - 5 - 2014

SEKRETARIS DAERAH,

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2014 NOMOR ..24.....